



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Oktober 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SUB UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ASREN NASUTION**
2. Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
3. NHK : **488190**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.106.648.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 401 m2/250 m2 di KOTA MEDAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 824.318.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 409 m2/260 m2 di KOTA MEDAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 951.500.000
3. Tanah Seluas 290 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp.
435.000.000
4. Tanah Seluas 572.81 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp.
859.500.000
5. Tanah Seluas 10.325 m2 di DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp.
516.250.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 372.5 m2/75 m2 di BATU BARA,
HASIL SENDIRI Rp. 277.750.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 116.33 m2/105 m2 di BATU BARA,
HASIL SENDIRI Rp. 242.330.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 134.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER-MX Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
2. MOTOR, YAMAHA T135HG Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
125.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	38.579.241
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.279.227.241
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.279.227.241

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **24 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.